

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Skripsi ini akan membahas tentang Politik Luar Negeri Amerika Serikat di Timur Tengah. Amerika Serikat mempunyai kebijakan untuk menghegemoni suatu kawasan untuk mencapai kepentingannya dan menekan negara-negara yang menentang mereka. (Syafie, 2010) Amerika Serikat memiliki beberapa kepentingan di kawasan Timur Tengah baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun militer karena kawasan Timur Tengah mempunyai nilai strategis dalam politik dunia. Nilai-nilai strategis tersebut membuat kawasan Timur Tengah menjadi tempat perebutan bagi kepentingan negara-negara besar di dunia terutama Amerika Serikat. Bahkan untuk mencapai kepentingannya, Amerika Serikat akan berupaya melakukan segala hal. (Nashrullah, 2020)

Sejak terjadi peristiwa 11 September 2001 yang di kenal sebagai fenomena penting yang mengubah tatanan dan dinamika politik keamanan internasional pasca Perang Dingin. Serangan yang terjadi di gedung World Trade Centre (WTC) dan markas pertahanan Pentagon pada tahun 2001 tersebut telah meyakinkan pemikiran dunia barat terutama Amerika Serikat terhadap Islam dan negara-negara Timur Tengah sebagai ideologi dari kaum teroris. Insiden 11 September 2001 memberi peluang lebar terhadap Amerika Serikat untuk memulai perang terhadap beberapa negara dengan kedok

terorisme internasional yang menurutnya menjadi ancaman dunia Internasional termasuk Irak. (Masduki, 2009)

Dalam pidatonya di Citadel di sebuah akademi militer di South Carolina, George W. Bush mengatakan prioritasnya dalam perang antiteroris adalah untuk mencegah para teroris memiliki senjata nuklir, biologi dan kimia. Secara tidak langsung pernyataan George W. Bush itu menuju kepada negara Irak, Iran dan Korea Utara. Negara-negara kriminal itulah yang menjadi sumber utama dalam membuat dan mengembangkan senjata nuklir, biologi, kimia untuk para teroris. Amerika Serikat tidak bisa dan tidak akan menerima negara yang melindungi, mendanai, melatih atau mempersenjatai agen teroris. George W. Bush mengancam negara-negara yang melanggar prinsip ini akan di anggap sebagai rezim musuh. Mereka telah di ingatkan agar mereka tengah di awasi. Inti pidato George W. Bush adalah soal senjata perusak masal serta tujuan baru untuk perang melawan terorisme. (Kristanti, 2019)

Sebelumnya pada tahun 1991 setelah kekalahan Irak dalam perang teluk II yaitu Irak telah di berikan sanksi ekonomi dan militer oleh PBB yang di lakukan lobi oleh Amerika Serikat serta pelarangan terhadap Irak untuk memiliki senjata kimia, biologi dan senjata pemusnah masal yang lainnya. Beberapa infrastruktur Irak untuk pengayaan uranium hancur dan Irak tidak dapat membangunnya kembali karena Irak mengalami krisis akibat dari sanksi ekonomi dan perang. Hal ini dapat di lihat bahwa Irak sudah tidak memproduksi senjata pemusnah masal lagi sejak di berikan sanksi oleh PBB. Peristiwa 11 September 2001 membuat Amerika Serikat menuduh jika Irak

memiliki senjata pemusnah masal dan memiliki hubungan dengan jaringan teroris. Amerika Serikat menganggap bahwa Irak telah melanggar sanksi yang di berikan oleh PBB terkait untuk memiliki senjata kimia, biologi dan senjata pemusnah masal. Hal ini sangat berbahaya dan dapat mengancam keamanan internasional. Amerika Serikat pada saat itu mengambil tindakan dengan cara militer untuk menyelesaikan masalah ini meskipun mendapat protes dari berbagai negara. (Mazduki, 2009)

Pada 20 Maret 2003, Presiden Amerika Serikat George W. Bush melalui tayangan televisi menyampaikan pada rakyat Amerika Serikat bahwa pasukan militer Amerika Serikat dan Inggris, sedang dalam tahap awal operasi militer bertajuk Operation Iraqi Freedom atau Operasi Pembebasan Irak. Presiden Amerika Serikat George W. Bush mendeklarasikan perang terhadap rezim Saddam Hussein. Presiden Amerika Serikat George W. Bush mengatakan bahwa Presiden Irak Saddam Hussein tidak terbuka sebagaimana yang di tuntutan oleh dunia kepadanya. Saddam Hussein adalah orang yang berbahaya di karenakan mempunyai senjata pemusnah masal yang berbahaya. Saddam Hussein di anggap berbahaya oleh Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya. Presiden Amerika Serikat George W. Bush mengatakan target pertama dalam penyerangan ke Irak adalah fasilitas penting militer Irak. Dengan Rudal jelajah Tomahawk yang di tembakkan dari pesawat tempur dan kapal perang Amerika Serikat yang di tempatkan di Teluk Persia. (Wijayanti, 2006)

Invasi merupakan aksi militer yang di mana angkatan bersenjata suatu negara memasuki daerah yang di kuasai oleh suatu negara lain dengan tujuan untuk menguasai daerah tersebut atau mengubah pemerintahan yang berkuasa. Invasi ini bisa menjadi penyebab perang dan bisa di gunakan sebagai strategi untuk menyelesaikan perang atau bahkan bisa menjadi inti dari perang. Invasi Amerika Serikat ke Irak bermula sebagai upaya pemberantasan terorisme, kemudian dengan alasan untuk membuka senjata pemusnah massal yang di kembangkan oleh rezim Saddam Hussein. Amerika Serikat menggunakan isu-isu terorisme dan kepemilikan senjata pemusnah massal ini untuk melegalkan aksinya dalam upaya menyerang Irak. Sebelumnya Amerika Serikat sudah berusaha menyelesaikan masalah Irak ini melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB, tetapi Amerika Serikat menilai bahwa Irak tidak menaati resolusi tersebut. Invasi Amerikat Serikat ini berdampak pada perkembangan politik dan mempengaruhi stabilitas politik dalam negeri Irak. (Ruslan, 2013)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, penulis akan membahas “Mengapa Amerika Serikat memilih opsi militer dalam perang Irak 2003?”

C. Kerangka Teori

1. Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan Luar Negeri merupakan kebijakan yang di ambil suatu negara ketika negara tersebut berinteraksi dengan negara lain di dunia internasional. Kebijakan Luar Negeri dapat di artikan secara umum sebagai sebuah strategi atau tindakan yang di gunakan oleh satu negara dalam berinteraksi dengan negara lain untuk mencapai kepentingannya. Menurut Rosenau kebijakan luar negeri merupakan upaya suatu negara dalam hal sikap dan aktivitasnya yang mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Kebijakan luar negeri menurut Rosenau ini di gunakan untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara. Sedangkan menurut Holsti kebijakan luar negeri merupakan suatu kebijakan yang di bentuk oleh pemerintahan sebuah negara atau komunitas politik lainnya dalam melakukan hubungan dengan aktor internasional baik itu negara atau aktor non negara. Kebijakan luar negeri berfungsi sebagai jembatan batas wilayah dalam negeri dan lingkungan internasional. Kebijakan luar negeri dapat berupa hubungan diplomatic antar aktor internasional, mengeluarkan doktrin, membuat aliansi dan mencanangkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Agar mencapai kepentingan nasional suatu negara, mereka akan melakukan apa saja termasuk berkompetisi, bekerjasama, berintegrasi dan berkonflik.

Setiap negara memiliki tujuan kebijakan luar negeri yang berbeda. Negara mengeluarkan kebijakan luar negerinya untuk memenuhi dan mencapai kepentingan pribadi maupun kolektifnya. Pada dasarnya kebijakan luar negeri suatu negara merujuk pada fenomena proses di mana negara-negara berupaya memenuhi kepentingan nasionalnya dalam masyarakat internasional. Kebijakan luar negeri muncul sebagai suatu fenomena sosial karena di setiap negara tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan sosial, politik dan ekonomi jika hanya mengandalkan sumber daya yang terdapat di dalam teritorialnya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah suatu negara akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat di penuhi sendiri di luar batas wilayah teritorialnya atau dalam berhubungan dengan aktor internasional lainnya pada arena internasional. Kepentingan nasional di suatu negara atau wilayah agar mencapai apa yang di inginkan maka negara tersebut akan membuat Kebijakan Luar Negeri khususnya Amerika Serikat. (Syarief, 2014)

2. Bureaucratic Politics

Politik Birokrasi merupakan hasil kebijakan dari permainan tawar-menawar yang terjadi di antara kelompok yang di tempatkan sebagai aktor pemerintah. Strategi dan tujuan kebijakan berdasarkan ide-ide yang berbeda tentang hasil yang terbaik untuk kepentingan organisasi dan pribadi mereka. Perundingan berlanjut melalui proses memberi dan menerima yang mencerminkan aturan main yang berlaku serta hubungan kekuasaan di antara para aktor. Para aktor akan mengejar kebijakan yang menguntungkan organisasi yang mereka wakili dari pada kepentingan nasional.

Peranan yang dilakukan birokrat yang terlibat dalam proses politik luar negeri dan tidak hanya memfokuskan perhatiannya pada pembuat keputusan politik luar negeri suatu negara, para birokrat juga bertanggung jawab pada pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sehingga mereka dapat mempengaruhi tindakan politik luar negerinya. (international, 2018)

Menurut Graham T. Allison, politik birokrasi adalah peran administrasi dan birokrasi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Graham T. Allison menegaskan bahwa politik birokrasi ini berpandangan pada aktor dan tidak peduli dengan pandangan struktural lapangan karenanya berfokus pada interaksi antara pemain yang mewakili birokrasi yang berbeda yang terlibat dalam permainan tawar-menawar yang disebut politik. Graham T. Allison berpikir bahwa faktor-faktor lain, seperti kepribadian, hubungan personal dan akses ke informasi juga memainkan peran penting dalam proses politik birokrasi. Aktor yang bertugas sebagai bagian dari pemerintahan politik seperti politisi yang ditunjuk oleh presiden Amerika Serikat, mungkin cenderung mengejar kepentingan dari pada pegawai negeri karir dengan organisasi yang sudah lama ada. Banyak aspek lingkungan kebijakan juga mempengaruhi dinamika politik birokrasi. (Jones, 2017)

Politik birokrasi telah digunakan untuk menggambarkan pengambilan keputusan dalam banyak konteks yang berbeda dan paling sering diterapkan pada pembuatan kebijakan nasional di Amerika Serikat dan khususnya pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Beberapa kritikus berpendapat bahwa dalam konteks Amerika

Serikat, hal tersebut meremehkan kekuasaan presiden yang mendominasi kebijakan melalui pemilihan dan kontrol pejabat yang di tunjuk. Politik birokrasi paling sering di terapkan pada pengambilan keputusan krisis. Pemerintah di anggap terdiri dari sekian banyak individu dan organisasi. Hal yang muncul adalah keputusan yang di pandang sebagai produk dari proses interaksi dan penyesuaian dari berbagai individu dan organisasi. Dengan kata lain, politik luar negeri merupakan proses politik yang meliputi perundingan, kompromi dan penyesuaian. (Durbin, n.d.)

Model politik birokrasi adalah salah satu dari tiga lensa konseptual yang digunakan oleh Graham T. Allison untuk menjelaskan pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Model aktor rasional (Model I), model proses organisasi (Model II) dan model politik pemerintahan (Model III). Pada intinya, model politik birokrasi memandang tindakan pemerintah sebagai hasil politik. Hasil ini muncul dari proses kebijakan luar negeri, karakteristik permainan kompetitif yang di mana banyak pemain yang memegang hak utama kebijakan yang berbeda berjuang, bersaing, dan tawar-menawar atas substansi dan pelaksanaan kebijakan. Posisi kebijakan yang di ambil oleh pengambil keputusan sebagian besar ditentukan, meskipun tidak secara langsung oleh peran organisasi mereka. (Daniarsyah, 2015)

Kebijakan luar negeri di hasilkan dari rasional aktor dan organisasi sebagai hasil tawar-menawar keputusan antara keduanya. Model politik birokrasi tidak melihat aktor kesatuan melainkan gabungan dari berbagai aktor sebagai pengambil keputusan. Pengaruh terhadap hasil akhir di tentukan oleh dua faktor yaitu yang pertama adalah

struktur pengaruh atau kekuatan yang melekat pada posisi profesionalnya, seperti otoritas, kewajiban, status, dukungan masyarakat, dukungan dari politisi, atau institusi, kontrol atas sumber daya, keahlian dan kontrol atas informasi memungkinkan menentukan arah pendefinisian suatu agenda dan masalah, saran saran, kontrol atas informasi. Kedua yaitu individu, kemauan seseorang untuk menggunakan pengaruh dalam proses, dan persepsi orang lain terhadap pengaruh yang di milikinya. (Yani, 2010)

3. Military Industrial Complex

Untuk menjelaskan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat yang memprovokasi konflik di Irak tahun 2003 perlu juga menggunakan teori Military Industrial Complex. Military Industrial Complex merupakan gabungan kekuatan bersenjata Amerika Serikat, industri persenjataan dan hubungan kepentingan politik dan komersial yang tumbuh dalam skala dan intensitas yang besar serta berpengaruh sejak Perang Dunia II, sepanjang Perang Dingin hingga sekarang. Jaringan Military Industrial Complex mencakup individu dan institusi yang terlibat dalam produksi senjata dan teknologi militer. Military Industrial Complex di suatu negara biasanya akan berupaya mengumpulkan dukungan politik dalam negeri untuk melanjutkan atau meningkatkan pengeluaran militer oleh pemerintah nasional. (Mufclihin, 2013)

Military Industrial Complex merupakan istilah yang pertama kali di gunakan oleh Presiden Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower dalam Pidato perpisahannya pada tanggal 17 Januari 1961. Dwight D. Eisenhower memperingatkan bahwa Amerika Serikat harus waspada terhadap pengaruh Military Industrial Complex yang mencakup seluruh anggota Kongres yang bergantung pada industri militer, Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan kontraktor militer milik pribadi seperti Lockheed Martin, Boeing dan Northrop Grumman. Dwight D. Eisenhower percaya bahwa Military Industrial Complex cenderung akan mempromosikan kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan kepentingan terbaik negara seperti partisipasi dalam perlombaan senjata nuklir dan Dwight D. Eisenhower khawatir bahwa pengaruh industry militer yang semakin besar jika di biarkan dan dapat merusak demokrasi Amerika Serikat.

Unsur-unsur Military Industrial Complex domestik dan internasional mendahului pidato Dwight D. Eisenhower yang penting. Pasukan militer yang telah di danai secara besar-besaran oleh pemerintah nasional yang secara sejarah menjadi tujuan upaya lobi oleh birokrat di kementerian terkait militer oleh legislator yang berisi pangkalan militer atau pabrik manufaktur militer utama dan oleh perwakilan perusahaan swasta yang terlibat dalam produksi senjata dan amunisi. Dari berbagai aktor ini memiliki tujuan dan kepentingan yang sama dan luas. Mereka cenderung mendukung membentuk kegiatan satu sama lain dan saling menguntungkan. Hubungan yang di lakukan oleh beberapa kritikus disebut sebagai segitiga besi antara pejabat pemerintah, pembuat undang-undang, dan perusahaan industri militer. (nabihah, 2018)

Beberapa ciri-ciri bervariasi Military Industrial Complex tergantung pada apakah ekonomi suatu negara lebih atau kurang berorientasi pasar. Di Amerika Serikat, produksi senjata berpindah dari perusahaan milik publik ke perusahaan swasta selama paruh pertama abad ke-20. Sedangkan di Prancis, pemerintah nasional mereka terus memiliki dan mengelola sebagian besar perusahaan yang berhubungan dengan militer. Meskipun dalam banyak kasus Military Industrial Complex yang beroperasi di dalam satu negara, seperti kasus Uni Eropa yang cakupannya bersifat internasional dan menghasilkan sistem senjata yang melibatkan perusahaan militer dari beberapa negara yang berbeda. (Fansuri, 2019)

Di sebagian besar negara Military Industrial Complex yang secara ekonomi maju cenderung memiliki sektor industri berteknologi tinggi yang beroperasi sesuai dengan aturan hukum, organisasi dan keuangannya sendiri. Personel negara tersebut terampil yang bergerak antara administrasi, produksi dan pengendalian yang di rencanakan secara terpusat terhadap kuantitas dan kualitas keluaran karena di sebagian besar negara kerumitan teknologi senjata modern dan preferensi untuk pemasok domestik, ada sedikit persaingan di sebagian besar pasar militer. Dinas militer harus memastikan bahwa pemasok mereka tetap layak secara finansial seperti di Amerika Serikat dan Inggris hal ini membutuhkan jaminan keuntungan untuk perusahaan swasta dan pemasok berusaha untuk memastikan agar pengeluaran publik untuk produk mereka tidak menurun. (Mas`oed, 1989)

Istilah Military Industrial Complex dapat merujuk pada lokasi fisik produksi militer. Pengeluaran militer dapat menciptakan konsentrasi ruang dari kontraktor utama, subkontraktor, konsultan, universitas, pekerja terampil, dan instalasi pemerintah, yang semuanya di gunakan khususnya untuk penelitian dan pengembangan atau pembuatan sistem dan teknologi militer. Contohnya seperti kompleks kedirgantaraan di California selatan, kompleks pembuatan kapal di pantai selatan Korea Selatan dan kompleks penelitian militer terisolasi Akademgorodok di Siberia. Berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, setidaknya pengaruh militer industri yang kompleks berkurang di banyak negara terutama Amerika Serikat dan Rusia. Namun, sebagian besar meningkat karena keterlibatan militer di Timur Tengah dan kekhawatiran tentang terorisme. Military Industrial Complex tetap akan menjadi kekuatan politik yang kuat di Amerika Serikat dan Rusia, serta di seluruh dunia. (Weber, n.d.)

Dalam pembuatan kebijakan luar negeri yang sangat di pengaruhi oleh politik domestik ada teori yang berhubungan dengan birokrasi politik bahwa dalam membuat keputusan itu sangat di warnai dengan proses-proses birokrasi. Permainan yang di lakukan di dalam proses birokrasi tersebut dalam konteks Amerika Serikat melibatkan kongres, kelompok kepentingan dan opini publik. Di dalam salah satu kelompok kepentingan tersebut terdapat military industrial complex. Military industrial complex berupaya mendapat dukungan politik domestiknya untuk meningkatkan anggaran belanja militer negara melalui proses birokrasi politik. Military industrial complex

memiliki aktor-aktor yang memiliki kekuatan dan kekuasaan seperti anggota kongres, departemen pertahanan dan industri militer yang di mana melakukan lobi-lobi politik untuk membuat kebijakan demi tercapai kepentingannya.

D. Hipotesa

Amerika Serikat memilih opsi militer di dalam perang irak 2003 di sebabkan oleh desakan atau lobi dari berbagai kepentingan industry militer, departemen pertahanan dan anggota kongres. Kombinasi yang di lakukan oleh industry militer, departemen pertahanan dan anggota kongres ini membuat kepentingan mereka dapat tercapai dengan kekuatan dan kekuasaan yang mereka miliki. Bagi industry militer, perang menjadi keuntungan besar bagi perusahaan pembuat senjata dan membuat perang sebagai ladang bisnis. Politik birokrasi yang di lakukan oleh Anggota Kongres dan Departemen pertahanan memiliki kepentingan yang sama selaku pembuat kebijakan, mengeluarkan dana dan melaksanakan kebijakan. Dengan terjadinya perang tersebut maka perusahaan produksi senjata akan mengalami keuntungan dengan senjatanya yang di perjual belikan.

E. Tujuan

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

Pertama, Politik Luar Negeri Amerika Serikat dan provokasi perang Irak 2003.

Kedua, Keterlibatan Industri militer, anggota kongres dan departemen pertahanan Amerika Serikat.

Ketiga, Lobi-lobi yang dilakukan kelompok elit

F. Metode Penelitian

Skripsi ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif di mana cara yang digunakan adalah dengan menggunakan data yang didapatkan dari sumber seperti buku, berita, artikel, beberapa situs resmi dan valid baik situs pemerintahan yang bersangkutan dengan menjawab rumusan masalah penelitian yang akan digunakan. Dalam penyusunan ini dibutuhkan data dan informasi yang sesuai dengan sifat permasalahannya agar data dan informasi yang diperoleh cukup lengkap digunakan sebagai dasar dalam membahas masalah yang ada untuk digunakan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan diproses untuk menarik kesimpulan.

Tujuan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena yang terjadi dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya dan menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data

yang di teliti. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja di kumpulkan oleh peneliti yang di gunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitiannya. Data sekunder ini biasanya di dapatkan melalui sumber seperti buku, publikasi pemerintah, catatan internal organisasi, laporan, jurnal, hingga berbagai situs yang berkaitan dengan informasi yang sedang di cari.